

HUMAN
RIGHTS
WATCH

“Memberantas Virus Ideologis”

Kampanye Represi Tiongkok
Terhadap Muslim Xinjiang

Ringkasan

Pelatihan ini hanya punya satu tujuan: mempelajari hukum dan peraturan...guna memberantas pikiran-pikiran tentang ekstremisme agama dan terorisme kekerasan, dan menyembuhkan penyakit ideologis. Jika pendidikan tak berjalan dengan baik, kami akan terus menyediakan pendidikan gratis, sampai para siswa mencapai hasil memuaskan dan lulus dengan baik.

Pidato oleh Cabang Liga Pemuda Komunis Tiongkok Xinjiang, Maret 2017

[A]pa yang mereka inginkan adalah memaksa kami untuk berasimilasi, untuk mengidentifikasi kami dengan negara, sehingga, di masa depan, ide Uighur hanya akan menjadi nama, tetapi tanpa maknanya.

Tohti, yang meninggalkan Xinjiang pada 2017, Maret 2018

Pemerintah Tiongkok telah lama menerapkan kebijakan represif terhadap masyarakat Muslim Turk di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR) di barat laut Tiongkok. Upaya-upaya ini telah meningkat secara dramatis sejak akhir 2016 ketika Sekretaris Partai Komunis Chen Quanguo pindah dari Daerah Otonomi Tibet untuk mengambil alih kepemimpinan Xinjiang.

Laporan ini menyajikan bukti baru tindakan pemerintah Tiongkok, yang melakukan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan secara massal terhadap Muslim Turk di Xinjiang dan merinci kontrol sistemik dan semakin meluas dalam kehidupan sehari-hari di sana. Pelanggaran yang merajalela ini melanggar hak-hak dasar kebebasan berekspresi, beragama, dan privasi, dan perlindungan dari penyiksaan dan pengadilan yang tidak adil. Secara lebih luas, pemerintah mengontrol kehidupan sehari-hari di Xinjiang terutama mempengaruhi etnis Uighur, Kazakh, dan minoritas lainnya, yang melanggar hukum internasional yaitu larangan terhadap diskriminasi.

Laporan ini terutama didasarkan pada wawancara dengan 58 mantan penduduk Xinjiang, termasuk lima mantan tahanan dan 38 kerabat dari para tahanan. Di antara yang kami wawancarai, 19 orang telah meninggalkan Xinjiang sejak Januari 2017. Orang-orang yang kami wawancarai berasal dari 14 prefektur di Xinjiang.

Pada bulan Mei 2014, Tiongkok meluncurkan "Kampanye Gebuk Keras atau *Strike Hard* Melawan Terorisme Kejam" (严厉打击暴力恐怖活动专项行动) di Xinjiang. Sejak itu, jumlah orang yang ditangkap secara resmi telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya, menurut angka resmi dan perkiraan dari organisasi non-pemerintah Pembela Hak Asasi Manusia Tiongkok. Pemerintah telah menahan orang-orang di pusat-pusat penahanan praperadilan (看守所) dan di penjara (监狱), yang keduanya merupakan fasilitas formal, dan di kamp-kamp pendidikan politik, yang tak punya dasar dalam hukum Tiongkok. Mereka yang ditahan telah ditolak hak proses hukumnya serta mengalami penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.

Perhatian media internasional di Xinjiang sejauh ini terfokus pada kamp pendidikan politik. Meskipun pemerintah Tiongkok tidak memberikan informasi secara terbuka mengenai jumlah tahanan di kamp-kamp ini, perkiraan yang dapat dipercaya menyebutkan jumlah orang yang berada di kamp-kamp ini sekitar satu juta.¹ Dalam fasilitas-fasilitas rahasia ini, para tahanan dipaksa untuk menjalani indoktrinasi politik selama sehari-hari, berbulan-bulan dan bahkan lebih dari setahun.

Merupakan hal biasa untuk menemukan orang Uighur — terutama dari Hotan dan Kashgar di selatan Xinjiang, yang dianggap oleh pihak berwenang sebagai *hotspot* anti-pemerintah — melaporkan bahwa setengah atau lebih anggota keluarga dekat mereka berada dalam campuran kamp pendidikan politik, tahanan praperadilan, dan penjara. Sebagai contoh, satu orang yang kami wawancarai mengatakan bahwa suaminya, empat saudara laki-lakinya, dan 12 keponakannya--semua lelaki dalam keluarga itu - telah ditahan di kamp pendidikan politik sejak tahun 2017.

Sejumlah laporan menyebutkan kematian beberapa orang di kamp-kamp pendidikan politik, yang menambah kekhawatiran tentang kekerasan fisik dan psikologis, serta stres akibat kondisi yang buruk, kelebihan kapasitas dan penahanan tanpa batas waktu. Meski perawatan medis dasar tersedia, orang-orang tetap ditahan bahkan ketika mereka memiliki penyakit serius atau manusia lanjut usia; ada juga anak-anak remaja, perempuan

¹ Adrian Zenz dalam "New Evidence for China's Political Re-Education Campaign in Xinjiang," *China Brief*, vol. 18, terbitan 10, 15 Mei 2018, <https://jamestown.org/program/evidence-for-chinas-political-re-education-campaign-in-xinjiang/> dan Inisiatif Pembela Hak Asasi Manusia dan Hak yang Sama Tiongkok, "China: Massive Numbers of Uyghurs & Other Ethnic Minorities Forced into Re-education Programs," 3 Agustus 2018, <https://www.nchr.org/2018/08/china-massive-numbers-of-uyghurs-other-ethnic-minorities-forced-into-re-education-programs/> (diakses 24 Agustus 2018).

hamil dan menyusui, dan penyandang disabilitas. Sejumlah mantan tahanan juga dilaporkan melakukan upaya bunuh diri dan ada hukuman berat bagi mereka yang membangkang di tempat itu.

Para pejabat Tiongkok telah membantah adanya penyiksaan; sebaliknya mereka mencirikan kamp-kamp ini sebagai “pendidikan kejuruan dan pusat pelatihan kerja” untuk “para pelaku kejahatan ringan.” Namun, mereka tidak memberikan izin masuk bagi kelompok independen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi hak asasi manusia, atau media.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok telah mencurahkan sumber daya keuangan, manusia, dan teknis sangat besar demi kontrol sosial di Xinjiang. Pihak berwenang telah mempekerjakan puluhan ribu personel keamanan tambahan saat membangun sejumlah “kenyamanan” di kantor polisi dan pos pemeriksaan di wilayah tersebut. Mereka secara ketat memantau jaringan keluarga dan sosial masyarakat sebagai indikator tingkat kepercayaan politik mereka. Pemerintah menahan orang-orang dan mengarahkan mereka ke tingkat kontrol yang lebih besar tidak hanya berdasarkan perilaku atau keyakinan mereka sendiri, melainkan juga anggota keluarga mereka - suatu bentuk hukuman kolektif yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional.

Tindakan represif di Xinjiang yang paling inovatif —dan mengganggu— mungkin adalah penggunaan sistem pengawasan massal berteknologi tinggi oleh pemerintah. Pihak berwenang Xinjiang melakukan pengumpulan data biometrik wajib, seperti sampel suara dan DNA, dan penggunaan kecerdasan buatan dan data besar untuk mengidentifikasi, membuat profil, dan melacak semua orang di Xinjiang. Pihak berwenang telah membayangkan sistem ini sebagai serangkaian “filter,” memilih orang-orang dengan perilaku atau karakteristik tertentu yang mereka yakini menunjukkan ancaman terhadap aturan Partai Komunis di Xinjiang. Sistem ini juga memungkinkan pihak berwenang untuk menerapkan kontrol mendalam, menundukkan orang-orang pada pembatasan yang berbeda-beda tergantung pada tingkat “kepercayaan” yang mereka rasakan.

Pihak berwenang telah berusaha untuk membenarkan perlakuan brutal itu atas nama stabilitas dan keamanan di Xinjiang, dan untuk “menggebuk” mereka yang dianggap teroris dan ekstrimis dengan cara “tepat” dan “mendalam.” Pejabat Xinjiang mengklaim

bahwa akar masalah ini adalah “ide-ide problematik” Muslim Turk. Ide-ide ini termasuk apa yang disebut oleh otoritas sebagai dogma agama ekstrem, juga setiap rasa identitas non-Han Tiongkok, baik itu Islam, Turk, Uighur, atau Kazakh. Pihak berwenang bersikeras bahwa keyakinan dan pertalian seperti itu harus “dikoreksi” — atau “diberantas.”

Selama lima tahun terakhir, sejumlah insiden kekerasan yang dikaitkan dengan pelaku Uighur telah dilaporkan di Xinjiang dan tempat lain di Tiongkok, dan ada sejumlah laporan tentang pejuang Uighur yang bergabung dengan kelompok ekstremis bersenjata di luar negeri. Pemerintah telah memberlakukan pembatasan yang jauh lebih besar pada Uighur daripada etnis minoritas lainnya. Namun, penduduk etnis Kazakh yang sebagian besar tinggal di utara Xinjiang sejak akhir 2016 semakin menjadi sasaran di bawah Kampanye Gebuk Keras ini.

Namun, mandat besar dari Kampanye Gebuk Keras untuk menghukum dan mengendalikan Muslim Turk di Xinjiang karena identitas mereka tak dapat dibenarkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan keamanan publik.

Dalam banyak hal, perlakuan terhadap semua Muslim Turk di Xinjiang — yang berada di dalam fasilitas tahanan dan yang seolah-olah gratis — mengandung kemiripan yang mengganggu. Di dalam kamp pendidikan politik, para tahanan dipaksa untuk belajar bahasa Mandarin, menyanyikan pujian terhadap Partai Komunis Tiongkok, dan menghafal aturan yang berlaku terutama bagi Muslim Turk. Mereka yang berada di luar kamp diminta untuk menghadiri upacara pengibaran bendera mingguan, atau bahkan harian, pertemuan indoktrinasi politik dan kadang-kadang kelas bahasa Mandarin. Para tahanan diberitahu bahwa mereka mungkin tidak akan diizinkan meninggalkan kamp, sebelum mereka mempelajari lebih dari seribu karakter bahasa Mandarin atau sebaliknya dianggap telah menjadi warga negara Tiongkok yang setia; Muslim Turk yang tinggal di luar tunduk pada pembatasan gerakan, mulai dari tahanan rumah hingga dilarang meninggalkan tempat mereka, dicegah meninggalkan negara itu. Di dalam, orang-orang dihukum karena mempraktekkan agama secara damai; di luar, pembatasan agama sangat ketat sehingga secara efektif melarang Islam. Di dalam, orang secara ketat diawasi oleh penjaga dan dilarang menghubungi keluarga dan teman-teman mereka. Mereka yang tinggal di rumah diawasi oleh tetangga mereka, petugas, dan sistem pengawasan massal yang didukung teknologi, dan tidak diizinkan untuk menghubungi mereka yang berada di luar negeri.

Kampanye Gebuk Keras Xinjiang juga berdampak di luar negeri. Otoritas Xinjiang telah membuat ikatan dengan pihak asing menjadi pelanggaran yang dapat dihukum, mengincar orang-orang yang punya hubungan dengan daftar resmi “26 negara sensitif,” termasuk Kazakhstan, Turki, Malaysia, dan Indonesia. Orang-orang yang pernah pergi ke negara-negara ini, atau memiliki keluarga atau berkomunikasi dengan orang-orang di sana, telah diinterogasi, ditahan, dan bahkan diadili serta dipenjara. Para responden melaporkan bahwa bahkan mereka yang memiliki koneksi dengan negara di luar daftar ini, dan mereka yang tertangkap menggunakan WhatsApp atau perangkat lunak komunikasi asing lainnya, juga telah ditahan. Dan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok telah meningkatkan tekanan pada pemerintah lain untuk secara paksa memulangkan orang Uighur di negara mereka kembali ke Tiongkok.

Human Rights Watch juga menemukan bahwa Kampanye Gebuk Keras atau *Strike Hard Campaign* ini telah menceraikan banyak keluarga, di mana beberapa anggota keluarga yang tinggal di Xinjiang dan di luar negeri secara tak terduga ditangkap karena pengetatan kontrol terhadap paspor dan perlintasan perbatasan. Anak-anak kadang terjebak di satu negara tanpa orang tua mereka. Karena pihak berwenang Xinjiang menghukum orang yang menghubungi keluarga mereka di luar negeri, banyak responden mengaku kehilangan kontak, termasuk dengan anak-anak kecil, selama berbulan-bulan atau lebih dari satu tahun. Beberapa orang lain mengaku bahwa keluarga mereka, saat berhasil dihubungi, telah diinstruksikan oleh pihak berwenang untuk menekan mereka agar kembali ke Xinjiang, atau untuk mendapatkan informasi rinci tentang kehidupan mereka di luar negeri. Akibatnya, banyak orang etnis Kazakh dan Uighur di luar negeri hidup dengan rasa takut dan kecemasan - terutama di negara-negara yang pemerintahannya dekat dengan Beijing - merasa bahwa mereka berada di bawah kontrol pemerintah Tiongkok, meskipun berada di seberang perbatasan atau bahkan tidak memiliki kewarganegaraan Tiongkok.

Pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang saat ini sudah berada dalam cakupan dan skala yang tak pernah terlihat di Tiongkok sejak Revolusi Kebudayaan 1966-1976. Pembentukan dan perluasan kamp pendidikan politik dan sejumlah praktik kejam lainnya menunjukkan bahwa komitmen Beijing untuk mengubah Xinjiang seperti dirinya bersifat jangka panjang.

Juga terbukti bahwa Tiongkok tidak mengantisipasi biaya politik yang signifikan terhadap kampanye Xinjiang yang kejam itu. Pengaruh globalnya telah menghindarkan negara ini dari kritik publik. Dengan posisi Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, berarti negara itu dapat membelokkan tindakan internasional, termasuk sanksi yang dikenakan oleh dewan atau tuntutan pidana dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), di mana Tiongkok bukan pendukungnya.

Hambatan politik untuk meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas sejumlah pelanggaran yang dilakukannya tidak membebaskan PBB dan para pemerintahan dari tanggung jawab untuk menegakkan perlindungan hak asasi manusia. Mereka seharusnya memanfaatkan forum internasional seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menghadirkan perhatian global terhadap masalah-masalah ini, terutama saat Tinjauan Berkala Universal terhadap Tiongkok, dan mencari tindakan bersama, seperti membentuk mandat khusus untuk menyelidiki Kampanye Gebuk Keras. Jika PBB tidak membentuk mekanisme guna menyelidiki berbagai pelanggaran di Xinjiang, pemerintah-pemerintah yang peduli seyogianya membuat mekanisme tersendiri untuk mengumpulkan bukti penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran lainnya.

Rekomendasi

Kepada Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok

- Menutup segera semua kamp pendidikan politik di Xinjiang dan bebaskan semua orang yang ditahan;
- Menghentikan segera “Kampanye Gebuk Keras Melawan Terorisme Kejam” di Xinjiang termasuk tim “*fanghuiju*,” “Menjadi Keluarga” dan sejumlah program wajib lain yang bertujuan mengawasi dan mengontrol Muslim Turk;
- Menghormati hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat, beragama dan budaya untuk memastikan bahwa Muslim Turk dapat terlibat dalam aktivitas damai dan menyuarakan keprihatinan dan mengemukakan kritik;
- Secara tidak memihak menyelidiki Sekretaris Partai Chen Quanguo dan pejabat senior lain yang terlibat dalam dugaan praktik-praktik kejam terkait dengan Kampanye Gebuk Keras, dan dengan tepat meminta para pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab;
- Memeriksa semua kasus dari mereka yang ditahan atau dipenjarakan atas tuduhan keamanan negara, terorisme atau ekstremisme dan membatalkan semua tuduhan yang keliru, serta meminta sidang ulang yang adil dalam kasus-kasus di mana mereka yang dinyatakan bersalah tidak menerima persidangan yang memenuhi standar proses hukum internasional;
- Menanggihkan pengumpulan dan penggunaan biometrik di Xinjiang sampai ada hukum nasional dan komprehensif yang melindungi privasi orang, menghapus data biometrik dan data terkait yang telah dikumpulkan berdasarkan kebijakan saat ini;
- Menahan diri dari pengumpulan dan penggunaan biometrik kecuali sesuai hukum dan didemonstrasikan seperlunya dan sebanding dengan tujuan pemerintah yang sah;
- Menghentikan pengoperasian program data besar, *Platform Operasi Bersama Terpadu*;
- Mengembalikan segera paspor ke para warga Xinjiang dan menghentikan kebijakan penarikan paspor;
- Berhenti menekan umat Muslim Turk di luar negeri untuk kembali atau mengumpulkan informasi tentang mereka. Berhenti menekan pemerintah tuan rumah untuk secara paksa memulangkan warga negara Muslim Turk di luar negeri

kecuali berdasarkan permintaan ekstradisi untuk alasan penegakan hukum yang sah;

- Memberikan kompensasi yang cepat dan memadai, termasuk perawatan medis dan psikologis, bagi orang-orang yang secara sewenang-wenang ditahan dan diperlakukan tidak semestinya di bawah Kampanye Gebuk Keras;
- Memberikan akses ke Xinjiang seperti yang diminta oleh beberapa prosedur khusus PBB.

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional

- Secara substansial mengubah Undang-Undang Kontraterorisme agar konsisten dengan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia. Mencabut definisi terorisme dan ekstremisme yang terlalu luas atau tidak jelas, termasuk sejumlah ketentuan yang mengkriminalisasi tindakan yang tidak memenuhi pelanggaran langsung dari hasutan teroris atau kekerasan ekstremis;
- Mengevaluasi dan merevisi undang-undang yang relevan dengan pengumpulan data biometrik untuk memastikan mereka sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional:
 - Standar-standar ini harus menjadi bagian dari kerangka hukum yang memastikan pengumpulan, penggunaan, penyebaran, dan penyimpanan data tersebut diperlukan dalam arti bahwa langkah-langkah yang kurang mengganggu tidak tersedia; dibatasi secara tepat untuk memastikan tindakan tersebut sebanding dengan tujuan yang sah seperti keselamatan publik; dan tidak merusak esensi dari hak atas privasi dan hak terkait lainnya.
 - Untuk memastikan bahwa standar-standar ini diberlakukan, program data biometrik juga harus menyertakan otorisasi independen untuk pengumpulan dan penggunaan, pemberitahuan publik, dan sarana pengawasan independen, serta kesempatan bagi orang untuk melawan pelanggaran dan memiliki akses ke pemulihan.
 - Pihak berwenang juga seharusnya mempublikasikan informasi tentang pengumpulan dan penggunaan teknologi pengenalan berbasis biometrik, termasuk pengungkapan tentang basis data yang telah dibuat dan pencarian khusus yang mereka lakukan.

Kepada Kongres Rakyat Daerah Otonomi Uighur Xinjiang

- Membatalkan Tindakan Penerapan Xinjiang pada UU Kontraterorisme dan Peraturan Kontraektrimisme Xinjiang;
- Membatalkan Regulasi Xinjiang tentang Urusan Agama dan semua regulasi, aturan, dan arahan lainnya yang membatasi orang untuk terlibat dalam praktik dan keyakinan agama yang damai.

Kepada Pemerintah Kazakhstan

- Mendesak pemerintah Tiongkok agar mengakhiri kampanye brutal melawan Muslim Turk, termasuk etnis Kazakh, dan membebaskan semua orang yang ditahan di kamp pendidikan politik di Xinjiang;
- Tidak memulangkan secara paksa (menolak) pengungsi dan pencari suaka ke Tiongkok. Mempercepat proses suaka bagi etnis Kazakh dan pencari suaka lainnya dari Xinjiang yang memiliki ketakutan akan penganiayaan jika kembali ke Tiongkok;
- Menyetujui kewarganegaraan untuk etnis Kazakh dari Tiongkok sesuai dengan program kewarganegaraan jalur cepat pemerintah;
- Mempercepat proses suaka untuk anak-anak etnis Kazakh di Kazakhstan yang berisiko mengalami persekusi di Tiongkok karena orang tua atau wali mereka telah ditahan di bawah Kampanye Gebuk Keras dan memungkinkan mereka untuk mengajukan kewarganegaraan sesuai dengan program jalur cepat pemerintah. Memastikan akses mereka kepada pendidikan.

Kepada Pemerintah Turki

- Memastikan agar etnis Uighur di Turki dilindungi dari pemulangan paksa ke Tiongkok, dan agar mereka yang tinggal dengan izin tinggal jangka pendek kemanusiaan di Turki memiliki hak dari waktu ke waktu untuk mengajukan permohonan tinggal jangka panjang dengan dasar yang sama;
- Mengizinkan anak-anak Uighur yang tidak didampingi untuk mendapatkan akses izin tinggal kemanusiaan. Memastikan akses mereka kepada pendidikan.

Kepada Pemerintah yang Peduli

- Secara terbuka dan tertutup mendesak pemerintah Tiongkok di tingkat tertinggi untuk mengakhiri Kampanye Gebuk Keras atau *Strike Hard*;
- Meningkatkan kepedulian tentang Xinjiang selama Tinjauan Berkala Universal Tiongkok tahun 2018 di Dewan Hak Asasi Manusia;
- Menerapkan sanksi yang ditargetkan, seperti UU Magnitsky Global Amerika Serikat dan protokol visa lainnya, terhadap Sekretaris Partai Chen Quanguo dan pejabat senior lainnya yang terkait dengan pelanggaran dalam Kampanye Gebuk Keras;
- Menerapkan mekanisme kontrol ekspor yang tepat untuk menolak akses Tiongkok terhadap teknologi yang digunakan untuk melanggar hak-hak dasar.
- Tidak secara paksa memulangkan etnis Uighur, Kazakh, atau Muslim Turk lainnya ke Tiongkok tanpa memberikan pemeriksaan individual secara penuh dan adil terkait risiko mereka akan dianiaya, disiksa, atau diperlakukan dengan buruk di Tiongkok;
- Menyelidiki intimidasi pemerintah Tiongkok terhadap komunitas diaspora Muslim Turk dan meminta hukum dalam negeri yang sesuai;
- Mempercepat klaim suaka kepada Muslim Turk yang berisiko dikembalikan secara paksa ke Tiongkok.
- Mengadvokasi pembentukan mekanisme khusus melalui PBB untuk menyelidiki pelanggaran di Xinjiang. Sampai saat itu dibentuk, negara-negara secara independen seyogianya mengumpulkan informasi tentang penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran lain di Xinjiang.
- Pemerintah dari negara-negara yang peduli seharusnya memantau perubahan perkembangan hak asasi manusia di Xinjiang, termasuk penindasan pemerintah yang meningkat terhadap penduduk Muslim Turk, memberikan tanggapan internasional yang cepat, termasuk kecaman publik dan sanksi yang ditargetkan.

Kepada Perusahaan asal Tiongkok dan Internasional yang Beroperasi di Xinjiang

- Memastikan agar operasi bisnis tidak mendukung Kampanye Gebuk Keras, khususnya, sistem pengawasan dan pembuatan profil biometrik yang dijalankan oleh Biro Keamanan Publik Xinjiang;

- Memastikan pengaturan bisnis dengan polisi Xinjiang atau pasukan keamanan lainnya tidak berkontribusi terhadap pelanggaran dan segera bertindak untuk mengakhiri hubungan semacam itu;
- Menetapkan mekanisme pengaduan yang efektif sehingga individu yang terkena dampak negatif oleh operasi bisnis atau investasi dapat mencari ganti rugi;
- Mengadopsi kebijakan eksplisit untuk mendukung hak asasi manusia dan menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak menghasilkan, atau berkontribusi terhadap, pelanggaran hak asasi manusia. Menganalisis dampak hak asasi manusia dari investasi atau operasi yang diusulkan, dan menerapkan strategi untuk mengurangi dampak buruk. Seperti “penilaian dampak hak asasi manusia” harus dilakukan dalam koordinasi dengan kelompok masyarakat sipil.